



Rencana Kerja - PD
Sekretariat Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara
Tahun 2025

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat perkenan Rahmat-Nya Dokumen **Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RANCANGAN AKHIR RENJA-PD) Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025** dapat diselesaikan. Ranwal Rencana Kerja PD pada dasarnya merupakan penterjemahan dari Rencana Strategis SETDA Kabupaten Kutai Kartanegara yang ditetapkan untuk kurun waktu lima tahunan. Dokumen ini menjadi acuan dalam melaksanakan kewenangan Sekretariat Daerah sekaligus rujukan dalam melakukan evaluasi pelaksanaan kinerja tahunan.

Dokumen Ranwal Rencana Kerja PD oleh karenanya memiliki arti yang sangat strategis dalam perencanaan anggaran berbasis kinerja. Dokumen ini menjelaskan tentang besarnya target yang akan dicapai selama tahun 2025, serta besarnya anggaran yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program, kegiatan dan Sub Kegiatan. Kami menyadari bahwa masih terdapat kurang sempurna dalam penyusunan dokumen ini. Oleh karena itu saran perbaikan dari semua pihak yang berkompeten akan sangat kami hargai.

Akhirnya semoga dokumen Rancangan Akhir RENJA-PD ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Tenggarong, 05 Agustus 2024

Sekretaris Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara,



Dr. H Sunggono, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19671004 198701 1001

Daftar Isi

	Hal
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	6
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA_PD	
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja_PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra_Perangkat Daerah	8
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	26
2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi PD	29
2.4 Review terhadap Rancangan Akhir RKPD	34
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan	46
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	
3.1 Telaahan terhadap kebijakan Nasional.	47
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja PD	50
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	
4.1 Program dan Kegiatan	56
BAB V PENUTUP	63

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai kartanegara merupakan unsur pembantu pimpinan Pemerintah Kabupaten yang dipimpin oleh Sekretaris Daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Sekretariat Daerah bertugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, administrasi, organisasi dan tata laksana serta memberikan pelayanan administrasi kepada seluruh Perangkat Daerah Kabupaten. Sekretaris Daerah untuk kabupaten diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati. Sekretariat Daerah KabupatenKutai kartanegara terdiri atas 3 Asisten; di mana Asisten masing-masing terdiri dari sebanyak- banyaknya 4 bagian dan setiap bagian terdiri dari 3 Sub bagian dibawahnya.

Rancangan Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan OPD untuk tahun 2025 disusun sebagai dasar acuan untuk melaksanakan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2025 dan selanjutnya dokumen perencanaan tersebut akan menjadi panduan dalam merencanakan kinerja tahunan yang akan disajikan dalam Rencana Kerja pada tahun berjalan.

Rancangan Rencana Kerja OPD merupakan Bentuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Kerja OPD untuk tahunan dan juga sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah. Dengan demikian terdapat keterkaitan yang sangat erat antara RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.

Sebagai dokumen perencanaan tahunan, Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) mempunyai arti strategis dalam penyelenggaraan program pembangunan tahunan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara mengingat beberapa hal sebagai berikut:

1. RANCANGAN AWAL RENJA-PD merupakan dokumen yang secara substansial penjabaran dari tujuan, sasaran, strategi, kebijakan program dan kegiatan seperti yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) dan sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).
2. RANCANGAN RENJA-PD merupakan acuan bagi PD dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) pada APBD Tahun 2024.
3. RANCANGAN AKHIR RENJA-PD merupakan salah satu instrumen evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PD untuk mengetahui capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan (RKT) sebagai wujud dari kinerja PD

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara adalah sebagai berikut :

1. Landasan Ideologi : Pancasila;
2. Landasan Konstitusional : UUD 1945;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3815);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
10. Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Capaian Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Indikator KinerjaKunci (IKK);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Capaian Kinerja Pelayanan Organisasi Perangkat Daerah berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
17. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Tahun 2010 Nomor 517);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2011 Nomor 310);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara

Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

22. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur No. 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2005-2025;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 17 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2005-2025;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Kartanegara;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemetaan Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 72);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2016 Nomor 73);
27. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 21 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara;
28. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 67 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Pada Sekretariat Daerah.
29. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2011-2026.
30. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2021 tentang Rencana

Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026.

31. Surat Sekretaris Daerah Kutai Kartanegara Nomor P-XX/BAPP/V/000.7.2/03/2024 Tanggal 07 Maret 2024 tentang Penyampaian Jadwal Penyusunan RKPD tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan penyusunan Rencana Kerja Akhri Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2025 adalah :

1. Untuk menetapkan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1 (satu) tahunan sesuai dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025.
2. Dijadikan sebagai salah satu instrumen acuan dalam penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) pada APBD Tahun 2025.
3. Sebagai parameter untuk lebih meningkatkan kinerja program, Kegiatan dan sub kegiatan yang ada pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam tahun anggaran berjalan.

1.4 Sistematika Penulisan

Naskah Rancangan Rencana Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara disusun dalam sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA_PD TAHUN LALU

2.6 Evaluasi Pelaksanaan Renja_PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra_PD

2.7 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

	2.8 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD
	2.9 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
	2.10 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III	TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
	3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
	3.2 Tujuan dan Sasaran Renja_PD
BAB IV	RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
	1.1 Program dan Kegiatan
BAB V	PENUTUP

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA_PD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja_Sekretariat Tahun Lalu Dan CapaianRenstra PD

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun 2023 dilakukan untuk mengetahui pencapaian kinerja Sekretariat tahun 2023 melalui analisis terhadap realisasi kinerja output fisik dan realisasi keuangan. Sedangkan Pencapaian kinerja output Renja tahun berjalan (2024) akan menggambarkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah yang diharapkan dan pencapaian kinerja keuangan akan menggambarkan seberapa besar pemanfaatan sumberdaya yang tersedia dalam menunjang pencapaian sasaran output.

Evaluasi ini selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja PD tahun tahun sebelumnya.

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dapat diketahui pada Program dan Kegiatan yang terealisasi sampai dengan Triwulan IV Tahun Anggaran 2024. Diantaranya:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak mernenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

Secara umum seluruh program dan kegiatan dilingkungan secretariat Daerah dapat terlaksana dengan baik sesuai target yang direncanakan, dan tidak terdapat program ataupun kegiatan yang tidak tercapai targetnya di akhir tahun, jika ada beberapa sub kegiatan yang realisasi keuanganya rendah dikarenakan ada efisiensi penggunaan anggaran, namun target fisik dapat tercapai sesuai target.

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Beberapa Program kegiatan yang realiasasi nya memperoleh Predikat tinggi atau sangat tinggi diantaranya Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat serta Program Perekonomian dan Pembangunan.
3. Realisasi program kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
Dari seluruh program dan kegiatan di lingkungan skretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tidak terdapat program / kegiatan yang realisasinya diatas 100 % pada tahun 2023.
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
Secara umum tidak terdapat program/ kegiatan yang tidak tercapai pada tahun anggaran 2023 sehingga tidak terdapat faktor atau perihai yang menjadi penyebab tidak tercapainya target kinerja.
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah;
Secara umum target kinerja Perangkat daerah dapat tercapai sesuai target yang telah ditetapkan implikasi yang dihasilkan adalah meningkatnya Kulaitas pelayanan publik yang dilaksanakan oleh perangkat daerah di buktikan dengan tingginya nilai Indeks Kualitas Pelayanan Masyarakat oleh bagian pada Sekretariat daerah baik secara internal mapun eksternal. Implikasi lainnya adalah peningkatan efektifitas koordinas dan peningkatan kualitas Kebijakan yang dihasilkan oleh Sekretariat Daerah sehingga diharapkan dari peningkatan tersebut dampaknya dapat dirasakan oleh masyarakat.
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut diantaranya adalah intensitas kegiatan meningkat secara

signifikan, upayan lainnya adalah peningkatan upaya inovasi pelaksanaan kegiatan dengan menyesuaikan kondisi dan situasi pandemi.

T-C. 29

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah 2023 dan
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2023

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA									
4	01	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			262.410.000	238.624.098				
4	01	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10	3	75,000,000	64.479.164	85.97	3	7	30%
4	01	01	2.01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	10	2	30,000,000	29.724.000	99.08	2	8	20%
4	01	01	2.01	07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	15	2	157,410,000.00	144.420.934	91.75	3	12	20%
4	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15		66.523.806.369	62.850.688.361				

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	634	0	59.593.801.009	56.084.954.901	94.11	634	-	100%
4	01	01	2.02	03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60	12	100.684.400	98.695.320	98.02	12	-	20%
4	01	01	2.02	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	60	12	335.709.000	301.529.611	89.82	12	-	20%
4	01	01	2.02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5	1	50.000.000	44.310.485	88.62	1	4	20%
4	01	01	2.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	5	1	521.800.000	502.473.520	96.30	1	4	20%
4	01	01	2.02	08	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	5	1	50.000.000	47.576.500	95.15	1	4	20%
4	01	01	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah			898.213.600	808.211.220				
4	01	01	2.03	01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	400	13	78.840.000	56.984.400	72.78	80	320	20%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	01	2.03	02	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	5	1	126.284.600	114.409.600	90.60	1	4	20%
4	01	01	2.03	03	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	5	1	60.000.000	48.881.600	81.47	1	4	20%
4	01	01	2.03	05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	1	142,660,000	116.260.000	81.49	1	4	20%
4	01	01	2.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	5	1	490.429.000	471.675.620	96.18	1	4	20%
4	01	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian			7.292.899.000	7.253.432.265				
					Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Dinas yang Diadakan	3300	3300	6.897.899.000	6.877.192.800	99.70			
4	01	01	2.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	5	1	395.000.000	376.239.465	95.25	1	4	20%
4	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			9.928.556.000	9.819.285.164				
4	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1305	261	1.433.512.000	1.412.268.700	98.52	261	1,044	20%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)												
4	01	01	2.06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34360	17110	6.525.000.000	6.518.039.950	99.89	20000	14,360	58%
4	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	255	51	308.344.000	303.574.620	98.45	60	195	24%
4	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2367	2265	1.200.000.000	1.199.071.594	99.92	2265	102	96%
4	01	01	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	634	634	461.700.000	386.330.300	83.68	634	-	100%
4	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	510		36.555.106.029	36.072.779.332				
4	01	01	2.07	01	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	70	14	17.340.157.320	17.058.746.292	98.38	14	(4.00)	20%
4	01	01	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	500	100	19.214.948.709	19.014.033.040	98.95	100	400	20%
4	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan (Bag. Umum & Bag. Perencanaan Dan Keuangan)	12		17.666.881.160	17.364.807.436				

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	01	2.08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	60	12	45,000,000	43.648.500	97.00	12	-	20%
4	01	01	2.08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	12	8.700.000.000	8.527.545.139	98.02	12	-	20%
4	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	12	3.050.069.200	3.022.465.773	99.09	12	-	20%
4	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	12	5.871.811.960	5.771.148.024	98.29	12	-	20%
4	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	132	222	30.371.596.925	28.636.661.789				
4	01	01	2.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67	35	2.233.462.348	2.111.413.810	94.54	35	-	50%
4	01	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	45	9	24.601.140.070	23.064.545.560	93.75	9	-	20%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	40	8	2.231.556.513	2.166.804.219	97.10	8	-	20%
4	01	01	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	340	170	1.305.437.994	1.293.898.200	99.12	170	-	50%
4	01	01	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2	26	1.418.153.965	1.011.187.135				
4	01	01	2.11	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	120	24	918,153,965	770.038.180	83.87	12	-	20%
4	01	01	2.11	03	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	10	2	500.000.000	241.148.955	48.23	2	-	20%
4	01	01	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	1165	1128	2.695.778.200	2.512.408.662				
4	01	01	2.13	01	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	15	3	550,000,000	544.851.210	99.06	3	-	20%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	01	2.13	02	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	20	4	400.000.000	365.342.051	91.34	4	-	20%
4	01	01	2.13	03	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	5	1	991.690.000	930.914.308	93.87	1	-	20%
4	01	01	2.13	04	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	6	0	400.000.000	338.335.995	84.58	2	4	33%
4	01	01	2.13	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2	2	354.088.200	332.965.098	94.03	2	-	100%
4	01	01	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5282	10239	18.628.512.191	18.487.569.709				
4	01	01	2.14	01	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1000	1000	7.163.744.005	7.161.443.962	99.97	1000	-	100%
4	01	01	2.14	02	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	320	322	8.884.630.900	8.785.121.773	98.88	332	(3,012)	41%
4	01	01	2.14	03	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	950	950	2.580.137.286	2.541.003.974	91.31	1000	4,898	105%
4	01	02			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT									

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	01	02	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	166	71	1.716.646.245	1.591.041.320				
4	01	02	2.01	01	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	75	15	567.176.000	517.868.119	91.31	113	-	20%
4	01	02	2.01	02	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	60	12	555.860.245	538.331.555	96.85	12	-	20%
4	01	02	2.01	03	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	15	3	593.610.000	534.841.646	90.10	3	12	20%
4	01	02	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Orang/ Lembaga Penerima Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	1820	1812	106.138.867.746	100.461.347.724				
4	01	02	2.02	01	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	250	50	79.901.151.043	75.802.111.331	94.87	50	(118)	26%
4	01	02	2.02	02	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan	160	16	762.000.000	487.915.064	64.03	19	18	20%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB								
	01	02	2.02	03	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	5568	1195	25.475.716.703	24.171.321.329	94.88	1262	-	20%
4	01	02	2,03		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah Dokumen Regulasi hasil Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	212	212	1.383.477.000	1.021.866.782				
4	01	02	2,03	01	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	1000	200	500.000.000	339.297.200	67.86	200	-	20%
4	01	02	2,03	02	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	20	4	708.477.000	544.005.600	76.79	10	-	20%
4	01	02	2,03	03	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	10	2	175,000,000	138.563.982	79.18	6	(4)	20%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
4	01	02	2,04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah	19	25	1.507.560.900	1.499.933.888				
4	01	02	2,04	01	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	60	17	450.000.000	449.898.379	99.98	12	-	20%
4	01	02	2,04	02	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	5	1	528.514.000	523.249.439	99.00	2	(1)	20%
4	01	02	2,04	03	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	30	7	529.046.900	526.786.070	99.87	6	-	20%
4	01	03			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN									
4	01	03	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	185	22	1.889.741.000	1.543.869.308				
4	01	03	2.01	01	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	15	3	440.000.000	361.831.300	82.23	3	-	20%
4	01	03	2.01	02	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	75	15	642.026.000	534.051.928	83.18	15	-	20%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	03	2.01	03	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	120	4	807.715.000	647.986.080	80.22	120	-	20%
4	01	03	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	155	122	1.641.460.385	1.417.962.812				
4	01	03	2.02	01	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	110	22	750.360.000	595.762.141	79.40	22	-	26%
4	01	03	2.02	02	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	25	5	631.350.385	569.974.237	90.28	5	-	20%
4	01	03	2.02	03	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	210	42	259.750.000	252.226.434	97.10	42	-	20%
4	01	03	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	763	684	2.563.600.000	2.546.430.784				
4	01	03	2.03	01	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	2500	555	716,200,000	706.667.537	98.67	594	-	24%
4	01	03	2.03	02	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	10	2	1.022,400,000	1.016.707.458	99.44	4	(3)	20%
4	01	03	2.03	03	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	50	10	825,000,000	823.055.789	99.76	10	-	20%

Kode					Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Fisik Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2022	Target dan Realisasi Kinerja Keuangan Program dan Kegiatan Tahun lalu 2023			Target Kinerja Program dan Kegiatan renja PD Tahun 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra PD s/d Tahun berjalan (2024)	
									Target Renja PD Tahun 2023	Realisasi Renja PD Tahun 2023	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja PD Tahun 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
4	01	03	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	27	27	1.097.000.000	1.080.674.000				
4	01	03	2.04	01	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	75	15	499.000.000	491.075.500	98.41	15	-	20%
4	01	03	2.04	02	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	30	6	374.000.000	365.701.000	97.78	6	-	20%
4	01	03	2.04	03	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	30	6	224.000.000	223.897.500	99.95	6	-	20%

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya melaksanakan penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif, pengoordinasian penyusunan kebijaksanaan daerah, pengoordinasian pelaksanaan tugas PD, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah, pelayanan administratif dan pembinaan ASN pada instansi daerah, serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara melaksanakan pelayanan, dengan indikator kinerja pelayanan yang telah disusun berdasarkan RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026, yang dituangkan kedalam Rencana Strategis (RENSTRA) Sekretariat Daerah Tahun 2021-2026.

Pada tahun 2023 penilaian terhadap capaian Indikator Kinerja Sekretariat Daerah dapat dilihat pada Tabel TC. 30, adapun pencapaian kinerja pelayanan pada Sekretariat Daerah Kab. Kutai Kartanegara Tahun 2024 masih dalam tahapan pelaksanaan sehingga belum bisa dilakukan penilaian terhadap indikator indikator tersebut, sedangkan proyeksi untuk Tahun 2025 adalah sebagaimana tabel berikut :

Tabel T-C.30.
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
I	I Indeks kualitas manajemen kebijakan, koordinasi dan pelayanan administrasi			67.04	69.90	72.76	75.41	N.A	85.95	72.76	75.41	
	1 Indeks kualitas kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan			n.a	88	89	90	N.A	88.14	89	90	
	2 Efektifitas koordinasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan			65	70	75	80	N.A	85.1	75	80	
	3 Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan			86	91	96	97	N.A	91.45	96	97	

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
	1 Indeks kualitas kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama			92	94	96	97	N.A	94	96	97	
	2 Efektifitas koordinasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama			77	78	79	81	N.A	79.667	79	81	
	3 Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama			86	87	88	89	N.A	87	88	89	
	4 Nilai LPPD			3.3	3.4	3.5	3.6	N.A	0	3.5	3.6	Tidak Dilakukan Penilaian oleh Kemendagri
	1 Indeks kualitas kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan SDA			81.7	84.7	89.7	91.7	N.A	86.63	89.7	91.7	

NO	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra - PD				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	
	2 Efektifitas koordinasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan SDA			65.5	68.5	70.5	75.5	N.A	74.5	70.5	75.5	
	3 Indeks kualitas pelayanan administrasi bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan SDA			77	80	82	85	N.A	87.04	82	85	

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara tetap mempertimbangkan isu-isu penting sebagai bentuk antisipasi terhadap perkembangan kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara secara garis besar, untuk mewujudkan program pembangunan pemerintah dan untuk mencapai indikator kinerja, meningkatnya pengawasan pelaksanaan Good Governance dalam upaya mendukung visi dan misi RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026.

1. Tingkat kinerja pelayanan PD dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan PD. Berdasarkan hasil evaluasi indikator kinerja pelayanan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2023 memperoleh hasil yang memuaskan dengan tercapainya semua target yang telah ditetapkan di awal tahun anggaran. Realisasi Anggaran Tahun 2023 mencapai 88,2 % dengan Realisasi Fisik Sebesar 98.2%, hal ini menggambarkan bahwa Kinerja Sekretariat Daerah dalam katagori Sangat Tinggi.
2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi PD adalah
 - a. Data dan Informasi tidak tersedia dengan lengkap dan aktual,
 - b. Penetapan program dan kegiatan/sub kegiatan cenderung didasarkan atas kebiasaan masa sebelumnya (Business As Usual), atau minim inovasi;
 - c. Kolaborasi dan Integrasi Kegiatan/Sub Kegiatan belum terbangun dengan baik;
 - d. Perencanaan yang tidak fokus, cenderung terbagi rata di masing-masing Pejabat Struktural;

- e. Kurangnya sarana dan prasarana, profesionalitas aparat pelaksana dan masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dibidang administrasi birokrasi pemerintah daerah;
 - f. Etika dan moral penyelenggara pemerintahan daerah belum sepenuhnya mampu menjawab tuntutan tugas dan fungsi yang diembannya;
 - g. Perubahan Struktur PD karena aturan baru Pemerintah Pusat, berakibat perubahan personalia seperti mutasi maupun pengurangan atau penambahan tupoksi baru yang juga memerlukan adaptasi baru bagi seluruh personalia PD;
 - h. Dinamisnya produk hukum dan perundang-undangan memerlukan kajian dan analisa bagi setiap pemerintah daerah dalam penerapan dan pelaksanaannya pada masing-masing daerah sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dan konflik dimasyarakat.
3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM dan SDGs (Sustainable Development Goals). Pencapaian tujuan dan sasaran kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai penjabaran dari visi dan misi Kabupaten Kutai Kartanegara serta akan sangat memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian visi dan misi secara nasional. Terdapat dua permasalahan yang memberikan dampak negatif terhadap pencapaian Visi Misi Kepala Daerah hal ini tergambar dalam proses pencapaian pemberian Beasiswa bagi 1000 guru yang menjadi tupoksi bagi Kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah. Akurasi data Guru yang bisa diberikan beasiswa belum tersedia dengan baik, jumlah target lebih besar dari kondisi riil dilapangan akibatnya realisasi kegiatan ini tidak dapat mencapai target maksimal, bukan karena tidak tersedia anggaran tetapi lebih karena tidak terdapat sasaran yang sesuai dengan yang diprogramkan. Kedua pencapaian target kegiatan bantuan sosial dan hibah bidang keagamaan,

dimana masih rendah nya tingkat pemenuhan persyaratan yang diwajibkan bagi penerima Bansos dan Hibah menjadi penyebab bantuan tidak dapat tersalurkan kepada calon penerima secara menyeluruh sesuai targe yang telah ditetapkan.

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan PD, yaitu;
 - a. Peningkatan sarana dan prasarana, profesionalitas aparat pelaksana dan perlunya peningkatan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dibidang administrasi birokrasi pemerintah daerah;
 - b. Etika dan moral penyelenggara pemerintahan daerah belum sepenuhnya mampu menjawab tuntutan tugas dan fungsi yang diembannya;
 - c. Belum maksimalnya pelaksanaan Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sehingga pelayanan dianggap masih belum sesuai harapan masyarakat;
 - d. Dinamisnya produk hukum dan perundang-undangan memerlukan kajian dan analisa bagi setiap pemerintah daerah dalam penerapan dan pelaksanaannya pada masing-masing daerah sehingga meminimalkan terjadinya kesalahan dan konflik dimasyarakat.
5. Peluang dalam peningkatan pelayanan PD, antara lain :
 - a. Tahun 2025 ditekankan pada penguatan dan perbaikan pola kerja Pola kerja efektif dan efsisien dengan mengoptimalkan teknologi informasi sebagai media koordinasi dan komunikasi yang transparan dan bertanggung jawab
 - b. Adanya upaya peningkatan sarana dan prasarana, profesionalitas aparat pelaksana dan peningkatan pemahaman masyarakat tentang peraturan perundang-undangan dibidang administrasi birokrasi pemerintah daerah melalui sosialisasi yang continyu;

- c. Adanya dukungan dari Pemerintah Daerah terutama penyediaan sistem aplikasi yang terintegrasi dilingkungan Pemerintah Daerah, sehingga dalam penyusunan segala bentuk pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah secara umum dan oleh Sekretariat Daerah secara khusus dapat berjalan maksimal;
 - d. Adanya Pelatihan/Bimtek terhadap aparatur terkait peningkatan IQ dan perbaikan ESQ, agar etika dan moral penyelenggara pemerintahan daerah mengalami peningkatan agar mampu menjawab tuntutan tugas dan fungsi yang diembannya, serta memaksimalkan pelaksanaan Standar Pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui SPIP yang melekat, sehingga peningkatan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dapat dicapai;
 - e. Adanya kajian dan analisa yang cermat bagi setiap PD teknis dalam menyikapi perubahan produk hukum dan perundang-undangan yang dinamis, terutama menyangkut beberapa kewenangan yang tidak lagi menjadi kewenangan kabupaten.
6. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program kegiatan prioritas tahun direncanakan. Dari isu-isu penting tersebut diatas dapat kami formulasikan dengan rekomendasi-rekomendasi sebagai berikut :
- Tema Pembangunan RPJMD yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah **“PEMANTAPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK AKSELERASI DAN TRANSFORMASI PEMBANGUNAN”**, hal hal yang menjadi sasaran kegiatan diantaranya:
- a. Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Layanan Publik.
 - Penataan Manajemen Organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah.
 - Penataan manajemen keuangan dan asset daerah

- Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan public yang lebih baik, cepat, mudah, murah dan bermutu berbasis IT.
- b. Penguatan Sektor Unggulan
- Peningkatan produktifitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
- c. Peningkatan Kualitas hidup masyarakat
- Peningkatan jangkauan dan akses layanan Pendidikan dan Kesehatan yang bermutu.
 - Penguatan modal sosial budaya, solidaritas social dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan.
 - Peningkatan ketrampilan perempuan dan pemenuhan hak hak anak.
- d. Peningkatan Layanan Dasar dan Perumahan
- Penyediaan dan penataan perumahan dan pemukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman.
- e. Penguatan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi kewilayahan
- Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat.
 - Penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan Kawasan strategis daerah.

Tugas dan fungsi perangkat daerah secara umum dalam rangka mendukung pencapaian RPJMD tersebut di tahun 2025 diharapkan untuk mampu melaksanakan point penting sebagai berikut :

1. Kebijakan belanja mandatory sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Visi-Misi dan Program Dedikasi Kukar Idaman
3. Penyelesaian kegiatan-kegiatan yang belum tuntas.
4. Dukungan pada kebijakan nasional dan provinsi.
5. Penyediaan Data dan Informasi pembangunan yang valid dan aktual

6. Penyusunan RKPD tepat waktu dan tepat substansi

Menanggapi isu-isu penting di atas Sekretariat Daerah sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi Koordinasi, Penyusunan Kebijakan dan fungsi pelayanan administratif diharapkan mampu untuk :

1. Berperan dalam Penataan Manajemen Organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah.
2. Peningkatan Kualitas Kebijakan yang disusun dan diberlakukan, serta,
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat, baik sebagai Perangkat Daerah yang memberikan Layanan Masyarakat secara langsung termasuk juga sebagai Koordinator dalam memastikan Pelayanan Pemerintahan Daerah secara umum telah sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 maka dapat dijelaskan bahwa RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 merupakan penjabaran tahunan dari RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026. Selanjutnya RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024 dijabarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah APBD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024. Adapun dalam penyusunannya RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara mengacu pada dokumen-dokumen perencanaan yang terkait seperti RPJM Nasional, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan RPJMD dan RKP Provinsi Kalimantan Timur. Pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026 setiap tahun dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah

(RKPD) sebagai suatu dokumen perencanaan tahunan pemerintah daerah yang memuat prioritas program dan kegiatan dari Rencana Kerja PD.

Tujuan Penyusunan RKPD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 adalah terciptanya sinkronisasi dan integrasi Program/Kegiatan Pembangunan antara Pemerintah Pusat dan Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara termasuk PD di lingkup Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, sehingga pembangunan dapat dilaksanakan secara optimal dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagaimana menyebutkan bahwa program prioritas pembangunan daerah memuat program-program yang berorientasi pada pemenuhan hak-hak dasar masyarakat dan pencapaian keadilan yang berkelanjutan sebagai penjabaran dari RPJMD pada tahun yang di rencanakan. Memperhatikan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara, Prioritas Nasional, Prioritas Provinsi serta berdasarkan identifikasi permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah di Kabupaten Kutai Kartanegara dan perkiraan kondisi tahun 2024 serta prospek tahun 2025 yang didasarkan pada Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) tahun 2021-2026 maka prioritas dan sasaran pembangunan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) tahun 2025 di tetapkan sebagai berikut dengan beberapa catatan penting diantaranya :

1. Penyesuaian anggaran Gaji dari BPKAD yang didasarkan pada hasil rekonsiliasi gaji tahun berjalan dan proyeksi kebutuhan pemenuhan gaji ASN dilingkungan Sekretariat Daerah untuk tahun 2025.

2. Diperlukanya penganggaran Medical cek up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, karena belum teranggarkan dalam Renstra PD tahun 2021-2026.
3. Penyesuaian kebutuhan anggaran pada bagian Kesejahteraan Rakyat Dalam melaksanakan tupoksi masing masing sub kegiatan.

Selanjutnya Review terhadap Rancangan RKPD Sekretariat Daerah tahun 2025 dapat tergambar dalam matrik berikut:

Tabel T.C 31
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025
Kabupaten Kutai Kartanegara

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
2	3	4	5	6	7	8	9	10		11
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	7 Dokumen	195,800,000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	8 Dokumen	650.000.000	
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	75,000,000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3 Dokumen	450,000,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	30,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2 Dokumen	50,000,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	90,800,000	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3 Dokumen	150.000.000	
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Laporan	60,737,167,163	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	15 Laporan	71.461.474.252	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	634 Orang/Bulan	59,827,312,763	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	550 Orang/Bulan	70.601.619.852	
Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	100,684,400	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	100,684,400	
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	187,370,000	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	12 Dokumen	187,370,000	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	50,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	25,000,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	521,800,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1 Laporan	521.800.000	
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	50,000,000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1 Dokumen	25.000.000	
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	84 Dokumen	492,950,000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	6 Dokumen	316.450.000	
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	80 Dokumen	78,840,000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	25.000.000	
Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	60,000,000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	1 Dokumen	60.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	60,000,000	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	1 Laporan	50.000.000	
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	142,660,000	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	30.000.000	
Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	151,450,000	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Laporan	151.450.000	
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	45,000,000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	45,000,000	
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	45,000,000	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dokumen	45,000,000	
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan	5,457,177,500	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	6 Layanan	5.356.550.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	261 Paket	1,140,000,000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	261 Paket	1,140,000,000	
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34360 Paket	2,860,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	34360 Paket	2.860.000.000	
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	51 paket	225,000,000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	51 paket	225.000.000	
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12401 Dokumen	100,627,500	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	12401 Dokumen	0	
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2367 Laporan	1,000,000,000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2367 Laporan	1.000.000.000	
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	634 Dokumen	131,550,000	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	634 Dokumen	131.550.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102 Unit	2,165,047,510	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102 Unit	2.165.047.510,	
Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	1,516,469,320	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	2 Unit	1.516.469.320,	
Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Unit	648,578,190	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	100 Unit	648,578,190	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	15,863,488,584	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	12 Bulan	19.554.501.160	
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	45,000,000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	45,000,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	7,000,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	10.634.000.000	
Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2,953,689,200	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2.953.689.200	
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5,864,799,384	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	5.921.811.960	
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Barang Milik Daerah	132 Unit	6,338,704,778	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Barang Milik Daerah	132 Unit	6.939.332.278	
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67 Unit	812,172,348	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	67 Unit	1.312.172.348	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang	16 Unit	3,224,968,250	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	16 Unit	3.224.968.250,	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Dipelihara/ Direhabilitasi								
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara /Direhabilitasi	15 Unit	1,401,564,180	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	15 Unit	1.401.564.180	
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	340 Unit	900,000,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	340 Unit	1.000.627.500,	
Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	918,153,965	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	2.026.463.814	
Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/ Bulan	918,153,965	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	24 Orang/ Bulan	1.026.463.814	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	-	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	2 Orang	1.000.000.000	Belum teranggarkan di Renstra
Penataan Organisasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	12 Dokumen	2,946,620,000	Penataan Organisasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	12 Dokumen	2,946,620,000	
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	550,000,000	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	3 Dokumen	550,000,000	
Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 laporan	400,000,000	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	3 laporan	400,000,000	
Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	1,196,620,000	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	2 Dokumen	1,196,620,000	
Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	400,000,000	Monitoring, evaluasi dan pengendalian kualitas pelayanan publik dan tata laksana	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	2 Dokumen	400,000,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	400,000,000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	2 Dokumen	400,000,000	
Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3 Kegiatan	11,939,561,750	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	3 Kegiatan	20.081.496.536	
Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 laporan	4,208,197,350	Fasilitasi Keprotokolan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	1 laporan	6.686.728.350	
Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 laporan	6,674,364,400	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	1 laporan	10.814.630.900	
Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 laporan	1,057,000,000	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	1 laporan	2.580.137.286	
PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Kutai Kartanegara				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Kab. Kutai Kartanegara				
Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	8 Dokumen	1,024,912,245	Administrasi Tata Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	8 Dokumen	2.105.048.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	418,600,000	Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	2 Dokumen	593.600.000	
Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	355,162,245	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	3 Dokumen	550.000.000	
Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	251,150,000	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	3 Dokumen	961.448.000	
Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang/ Lembaga Penerima Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	179 Dokumen	30,831,198,203	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang/ Lembaga Penerima Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	179 Dokumen	39.824.724.703	
Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	168 Dokumen	19,804,473,500	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	12 Dokumen	27.560.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	62,000,000	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	4 Dokumen	800.000.000	
Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan,	7 Dokumen	10,964,724,703	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	7 Dokumen	10,964,724,703	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Kearsipan, Trantibum Linmas								
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Orang	0	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	100 Orang	250.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100 Orang	0	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	100 Orang	250.000.000	
Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Regulasi hasil Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	562 Dokumen	1,025,008,000	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Regulasi hasil Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	562 Dokumen	1.175.000.000	
Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen	500,008,000	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	500 Dokumen	550.000.000	
Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	6 Kasus	350,000,000	Fasilitasi Bantuan Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum	6 Kasus	450.000.000	
Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2 Dokumen	175,000,000	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	2 Dokumen	175,000,000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah	20 Dokumen	1,408,514,000	Fasilitasi Kerjasama Daerah	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kerjasama Daerah	20 Dokumen	1.608.514.000	
Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	450,000,000	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	12 Dokumen	542.000.000	
Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	2 Dokumen	528,514,000	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	2 Dokumen	548.514.000	
Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	6 laporan	430,000,000	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	6 laporan	518.000.000	
PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN					
Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Dokumen	718,750,000	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Dokumen	1.721.250.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan	Dokumen	340,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Dokumen	590.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		Pengelolaan BUMD dan BLUD								
Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	231,250,000	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Laporan	531.250.000,00	
Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	147,500,000	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Dokumen	600.000.000	
Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	14 Dokumen	656,100,385	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	14 Dokumen	1.841.100.385	
Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	215,000,000	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Dokumen	950.000.000	
Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	281,350,385	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Laporan	631.350.385	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	159,750,000	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Laporan	259.750.000	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	595 Dokumen	1,325,000,000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	595 Dokumen	3.454.000.000	
Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	500,000,000	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Dokumen	1.754.000.000	
Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	300,000,000	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Dokumen	900.000.000	
Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	525,000,000	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Orang	800.000.000	
Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	27 Dokumen	947,000,000	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	27 Dokumen	1.397.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	15	499,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	15	599.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	6	224,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	6	474.000.000	
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat	6	224,000,000	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Kab. Kutai Kartanegara	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat	6	324.000.000	

Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	
		dan Kawasan Permukiman, Pertanahan					dan Kawasan Permukiman, Pertanahan			
			Total	145,036,154,083				Total	184.669.572.638	

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berdasarkan hasil kajian pengumpulan informasi dilapangan dan pengamatan maka disusun dan diusulkan Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 meliputi 3 (lima) program yang dilaksanakan dalam 19 (Sembilan belas) kegiatan, dan 66 (enam puluh Enam) sub kegiatan. Program dan Kegiatan tersebut merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi PD Sekretariat Daerah yang tertuang dalam Renstra PD tahun 2021 – 2026, selain itu tidak terdapat Usulan Program dan Kegiatan dari pemangku Kepentingan baik dari Perangkat Daerah maupun dari kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan pelayanan PD, untuk usulan Kegiatan dari masyarakat melalui SIPD belum dapat disajikan karena dalam tahap penyusunan Dokumen rancanagan Rencana Kerja (Ranwal Renja) Perangkat Daerah ini belum dilakukan penghimpunan Data usulan dari masyarakat, usulan melalui SIPD baru dibuka setelah Proses Musrenbang Kecamatan dan Forum Perangkat Daerah selesai dilaksanakan.

Tabel TC. 32

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024 Kabupaten Kutai Kartanegara

No	Kegiatan/ Sub Kegiatan	LOKASI			Indi kator Kinerja	Vol	Catatan		
		RT	Kec	Kel			STATUS	REKOMENDASI MITRA	Rekomendasi Kecamatan

NIHIL

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Prioritas pembangunan daerah untuk Tahun 2025 sebagai arahan bagi OPD dalam menjabarkan program dan kegiatan yang dibutuhkan pada tahun rencana. Untuk masing-masing prioritas pembangunan, selanjutnya dirumuskan tujuan dan sasaran strategis yang hendak dicapai dengan fokus yang menyangkut prioritas program, serta rincian indikasi kegiatan prioritas.

Mempertimbangkan beberapa aspek dalam kebijakan pembangunan baik nasional maupun daerah, sebagaimana yang tertuang dalam Rancangan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025, maka penyusunan prioritas program dan kegiatan Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Korelasinya terhadap pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan nasional, seperti terhadap SDGs, pertumbuhan ekonomi, Standar Pelayanan Minimal, Reformasi Birokrasi, pengentasan kemiskinan, dan penciptaan lapangan kerja.
2. Korelasinya terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah yang dituangkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021-2026.
3. Korelasinya terhadap prioritas pembangunan dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2024, serta permasalahan-permasalahan yang mendesak untuk diselesaikan pada tahun rencana.
4. Korelasinya terhadap Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

5. Korelasinya terhadap Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Pada pembangunan tahun 2025 ini merupakan tahun ketiga bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam merealisasikan RPJMD 2021-2026. Merujuk hal tersebut, RKPD Tahun 2025 ini memiliki arah pembangunan berdasarkan arahan pembangunan jangka menengah pada tema/fokus di tahun kedua pelaksanaan RPJMD 2021-2026. Sebagai acuan pembangunan tahunan, akan diadopsi rumusan kebijakan RPJMD di tahun kedua baik berupa sasaran, prioritas, dan program serta kegiatan, agar dalam pembangunan selanjutnya pemerintah daerah mempunyai pijakan langkah yang lebih kuat dan mampu menyelenggarakan pembangunan dengan optimal.

Dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara, rumusan sasaran prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dirumuskan dalam rangka meningkatkan capaian kinerja pada setiap aspek pembangunan yang diharapkan memberikan dampak pada capaian target sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara sehingga mencapai sasaran dan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan.

Menindaklanjuti fokus pembangunan, pemerintah daerah harus mampu merumuskan sasaran tepat untuk mengantisipasi, mengatasi dan segala isu, permasalahan pembangunan daerah di tahun 2025. Berdasarkan arah pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dalam RPJMD Tahun 2021-2026 dan mengacu pada arah pembangunan tahun ke-V, maka tema pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara pada tahun 2025 adalah: **“PEMANTAPAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT UNTUK AKSELERASI DAN TRANSFORMASI PEMBANGUNAN”**

Berdasarkan tema pembangunan yang telah dirumuskan, maka terlihat pada tahun 2025 pembangunan Kutai Kartanegara diarahkan pada pengembangan dan pemerataan infrastruktur dasar, konektivitas serta peningkatan sumber daya manusia baik pada sektor kesehatan, pendidikan maupun kondisi sosial ekonomi lainnya.

Berdasarkan rumusan sasaran pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2024, maka prioritas pembangunan Kabupaten Kutai Kartanegara dijabarkan sebagai berikut:

- a. Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Layanan Publik.
 - Penataan Manajemen Organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah.
 - Penataan manajemen keuangan dan asset daerah
 - Peningkatan jangkauan dan mutu layanan pemerintahan dan layanan public yang lebih baik, cepat, mudah, murah dan bermutu berbasis IT.
- b. Penguatan Sektor Unggulan
 - Peningkatan produktifitas, nilai tambah dan pendapatan dari pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan
- c. Peningkatan Kualitas hidup masyarakat
 - Peningkatan jangkauan dan akses layanan Pendidikan dan Kesehatan yang bermutu.
 - Penguatan modal sosial budaya, solidaritas social dan ketahanan sosial dalam kehidupan kemasyarakatan.
 - Peningkatan ketrampilan perempuan dan pemenuhan hak hak anak.
- d. Peningkatan Layanan Dasar dan Perumahan
 - Penyediaan dan penataan perumahan dan pemukiman, air bersih dan sanitasi yang sehat, layak dan aman.
- e. Penguatan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi kewilayahan

- Percepatan pembangunan desa sebagai basis produksi pangan dan pemberdayaan masyarakat.
- Penguatan kecamatan sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan Kawasan strategis daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja_PD

Perumusan tujuan dan sasaran jangka menengah merupakan langkah strategis dalam perencanaan pembangunan yang akan mendasari penyusunan kinerja SKPD selama lima tahun. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan dan menangani isu strategis yang dihadapi. Rumusan tujuan merefleksikan konteks pembangunan yang memiliki keterkaitan dengan visi yang ingin dicapai oleh SKPD. Pernyataan tujuan ini selanjutnya akan diterjemahkan kedalam sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh SKPD. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam merumuskan tujuan adalah bahwa tujuan harus realistis dan dapat dicapai.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran perlu memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Dalam merumuskan sasaran yang perlu diperhatikan adalah:

1. Sasaran harus dapat menyatakan sebuah target yang terukur atas sebuah kondisi atau pencapaian tujuan, fokus, spesifik, dan sesuai dengan bidang layanan SKPD;
2. Indikator kinerja urusan yang menjadi tugas dan fungsi SKPD;
3. Kelompok sasaran yang dilayani;
4. Profil pelayanan terkait indikator kinerja;
5. Isu-isu strategis SKPD yang sesuai dengan bidang layanan SKPD;

6. Pernyataan tujuan yang telah dirumuskan;
7. Pencapaian satu tujuan dapat saja melalui beberapa sasaran; dan
8. Kriteria SMART-C yaitu:
 - a) *Specific* (spesifik), yakni sifat dan tingkat sasaran dapat diidentifikasi dengan jelas;
 - b) *Measurable* (dapat diukur), yakni target sasaran dinyatakan dengan jelas dan terukur;
 - c) *Achievable* (dapat dicapai), yakni target sasaran dapat dicapai terkait dengan kapasitas dan sumber daya yang ada;
 - d) *Relevant* (relevan), yakni mencerminkan keterkaitan antara target sasaran dengan tujuan;
 - e) *Time Bound* (batas waktu), yakni periode pencapaian sasaran ditetapkan; dan
 - f) *continously improve* (perbaikan berkelanjutan), yakni sasaran dapat dicapai secara bertahap

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Mengacu pada Visi dan Misi Bupati Kutai Kartanegara, dimana Sekretariat Daerah diharuskan untuk mencapai target Misi nomor satu pada RPJMD yaitu “Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani”, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara selanjutnya merumuskan Tujuan dan Sasaran serta Indikator Jangka Menengah Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, tahun 2021-2026 dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tujuan 1 : Meningkatnya kualitas kebijakan, koordinasi dan pelayanan administratif.

Sasaran 1 : Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan

evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang umum, organisasi, protokol dan komunikasi pimpinan dan perencanaan dan keuangan.

Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang tata pemerintahan, kesejahteraan rakyat, hukum dan kerjasama.

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah, penyusunan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah bidang perekonomian, administrasi pembangunan, pengadaan barang dan jasa dan sumber daya alam.

Sekretariat Daerah sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi Koordinasi, Penyusunan Kebijakan dan fungsi pelayanan administratif diharapkan mampu untuk :

- a. Berperan dalam Penataan Manajemen Organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah.
- b. Peningkatan Kualitas Kebijakan yang disusun dan diberlakukan, serta,
- c. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat, baik sebagai Perangkat Daerah yang memberikan Layanan Masyarakat secara langsung termasuk juga sebagai Koordinator dalam memastikan Pelayanan Pelayanan Pemerintah Daerah secara umum telah sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Program dan Kegiatan

- a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

1. Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah terpilih

Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan instansi teknis di lingkungan pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang diberikan kewenangan melaksanakan urusan wajib pemerintahan. Pelaksanaan kewenangan tersebut selain dipengaruhi oleh kondisi lingkungan internal juga dipengaruhi oleh kondisi lingkungan eksternal, Misi Kepala Daerah yang dibebankan Kepada Sekretariat Daerah diantaranya :

- a) Memantapkan Birokrasi Yang Bersih, Efektif, Efisien Dan Melayani.
- b) Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia Yang Berakhlak Mulia, Unggul Dan Berbudaya

2. Pencapaian SDGs

Dalam hal pencapaian Tujuan Pembangunan berkelanjutan Sekretariat Daerah memiliki Peran untuk memastikan implementasi pelayanan publik dan indikator SDGs berjalan baik di tingkat kabupaten dan terkoordinasi dengan baik pada setiap perangkat daerah. Sekretariat daerah memiliki fungsi koordinatif, monitoring dan evaluasi atas pencapaian visi dan misi kepala daerah. Sejatinya keberhasilan tujuan SDGs membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan yakni pemerintah pusat dan pemerintah daerah, pelaku usaha, akademisi dan praktisi, serta organisasi masyarakat dan media

3. Pengentasan Kemiskinan.

Upaya pengentasan kemiskinan sesungguhnya tidak mungkin dibebankan kepada salah satu perangkat daerah saja. Karenadari sisi kriteria kemiskinan sendiri terdapat beberapa bagian merupakan tanggung jawab instansi terkait lainnya. Sekretariat daerah berfungsi lebih kepada upaya mengkoordinasikan seluruh stakeholder yang terkait dengan upaya penanganan kemiskinan di tingkat kabupaten.

4. Pencapaian SPM

SPM merupakan salah satu kebijakan prioritas nasional yang akan menjadi tolok ukur untuk digunakan dalam penyelenggaraan pelayanan dan acuan dalam penilaian kualitas pelayanan sekaligus sebagai kontrol terhadap kinerja pemerintah daerah dalam melayani masyarakat, untuk itu pemerintah daerah diharapkan mampu menyelenggarakan urusan wajib secara lebih sesuai dengan yang ditetapkan dalam SPM masing-masing sesuai petunjuk Kementerian/Lembaga terkait dan dapat memprioritaskan pendanaan pelaksanaan daerah dalam belanja daerah dan wajib melaporkan penerapan SPM, karena hasil penerapan SPM akan digunakan untuk merumuskan kebijakan nasional dan sebagai pertimbangan pemberian insentif dan disinsentif dengan mempertimbangkan keuangan negara.

Bagian dari NSPK

1. SPM adalah jenis dan mutu pelayanan dasar yang berhak diperoleh setiap warga Negara.
2. Pelayanan Dasar adalah pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara
3. Wujud dari upaya pemerataan hasil pembangunan daerah
4. Dalam bentuk program dan kegiatan pemda
5. Ditetapkan oleh Pusat dalam Peraturan Pemerintah

6. Juknis Pelaksanaannya dalam bentuk peraturan menteri, peraturan daerah, dan lainnya

Fungsi Sekretariat Daerah adalah memastikan bahwa seluruh perangkat daerah pengampu SPM dapat menjalankan tugasnya dengan baik serta menghimpun laporan pelaksanaan SPM yang diampu oleh Perangkat Daerah terkait.

- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, antara lain meliputi :
 1. Pada tahun anggaran 2025 Jumlah Program yang dilaksanakan Sekretariat Daerah sebanyak 3 Program dengan 19 kegiatan dan 67 Sub Kegiatan.
 2. Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah menyesuaikan jenis, target dan sasaran program maupun kegiatan, Lokasi kegiatan bisa bersifat menyeluruh di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara.
 3. Total kebutuhan dana/ pagu indikatif di tahun 2025 adalah sebesar Rp. 145,036,154,083, -
- c. Tabel Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat Daerah tahun 2025 dan Perkiraan maju Tahun 2026 Kabupaten Kutai Kartanegara.

T-C. 33

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara

Kode	Program /Kegiatan/Sub Kegiatan/ Paket Pekerjaan				Indikator Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
						Lokasi	Target	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10
4	1	1			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1) Nilai SAKIP 2) Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan Kepala Daerah/Pimpinan 3) Persentase Nilai SAKIP Perangkat Daerah Predikat BB dan A 4) PERSENTASE ASET YANG DI MANFAATKAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH		131,542,935,550				107,099,671,250
4	1	1	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen rencana, anggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara	5	650,000,000		5	195,800,000
4	1	1	2.01	1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara	2	450,000,000		2	75,000,000
4	1	1	2.01	6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab Kutai Kartanegara	1	50,000,000		1	30,000,000
4	1	1	2.01	7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara	2	150,000,000		2	90,800,000

4	1	1	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah laporan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang akuntabel	Kab Kutai Kartanegara	577	71,461,474,252			577	60,737,167,163
4	1	1	2.02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab Kutai Kartanegara	550	70,601,619,852			550	59,827,312,763
4	1	1	2.02	3	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab Kutai Kartanegara	12	100,684,400			12	100684400
4	1	1	2.02	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Kab Kutai Kartanegara	12	187,370,000			12	187,370,000
4	1	1	2.02	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab Kutai Kartanegara	1	25,000,000			1	50,000,000
4	1	1	2.02	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab Kutai Kartanegara	1	521,800,000			1	521,800,000
4	1	1	2.02	8	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab Kutai Kartanegara	1	25,000,000			1	50,000,000
4	1	1	2.03		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Barang Milik Daerah (BMD) pada Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara	6	316,450,000			6	492,950,000
4	1	1	2.03	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Kab Kutai Kartanegara	2	25,000,000			2	78,840,000
4	1	1	2.03	2	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab Kutai Kartanegara	1	60,000,000			1	60,000,000
4	1	1	2.03	3	Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Kab Kutai Kartanegara	1	50,000,000			1	60,000,000
4	1	1	2.03	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab Kutai Kartanegara	1	30,000,000			1	142,660,000
4	1	1	2.03	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kab Kutai Kartanegara	1	151,450,000			1	151,450,000

4	1	1	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian	Kab Kutai Kartanegara	1	45,000,000			1	45,000,000
4	1	1	2.05	3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Kab Kutai Kartanegara	1	45,000,000			1	45,000,000
4	1	1	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab Kutai Kartanegara	37674	5,356,550,000			37674	5,457,177,500
4	1	1	2.06	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Kutai Kartanegara	261	1,140,000,000			261	1,140,000,000
4	1	1	2.06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab Kutai Kartanegara	34360	2,860,000,000			34360	2,860,000,000
4	1	1	2.06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kab Kutai Kartanegara	51	225,000,000			51	225,000,000
4	1	1	2.06	6	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	Kab Kutai Kartanegara	1254	-			1254	100,627,500
4	1	1	2.06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab Kutai Kartanegara	2368	1,000,000,000			2368	1,000,000,000
4	1	1	2.06	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Kab Kutai Kartanegara	634	131,550,000			634	131,550,000
4	1	1	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah pengadaan barang milik daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah	Kab Kutai Kartanegara	12	2,165,047,510			12	2,165,047,510
4	1	1	2.07	1	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kab Kutai Kartanegara	2	1,516,469,320			2	1,516,469,320
4	1	1	2.07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Kab Kutai Kartanegara	10	648,578,190			10	648,578,190
4	1	1	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah waktu penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	Kab Kutai Kartanegara	50	19,554,501,160			50	15,863,488,584
4	1	1	2.08	1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kab Kutai Kartanegara	12	45,000,000			12	45,000,000
4	1	1	2.08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab Kutai Kartanegara	12	10,634,000,000			12	7,000,000,000

4	1	1	2.08	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab Kutai Kartanegara	14	2,953,689,200			14	2,953,689,200
4	1	1	2.08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab Kutai Kartanegara	12	5,921,811,960			12	5,864,799,384
4	1	1	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah	Kab Kutai Kartanegara	438	6,939,332,278			438	6,338,704,778
4	1	1	2.09	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kab Kutai Kartanegara	67	1,312,172,348			67	812,172,348
4	1	1	2.09	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Kutai Kartanegara	16	3,224,968,250			16	3,224,968,250
4	1	1	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Kutai Kartanegara	15	1,401,564,180			15	1,401,564,180
4	1	1	2.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab Kutai Kartanegara	340	1,000,627,500			340	900,000,000
4	1	1	2.11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab Kutai Kartanegara	4	2,026,463,814			4	918,153,965
4	1	1	2.11	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab Kutai Kartanegara	2	1,026,463,814			2	918,153,965
4	1	1	2.11	3	Pelaksanaan Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Kab Kutai Kartanegara	2	1,000,000,000			2	-
4	1	1	2.13		Penataan Organisasi	Jumlah Dokumen Penataan Organisasi	Kab Kutai Kartanegara	12	2,946,620,000			12	2,946,620,000
4	1	1	2.13	1	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	Kab Kutai Kartanegara	4	550,000,000			4	550,000,000
4	1	1	2.13	2	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab Kutai Kartanegara	3	400,000,000			3	400,000,000

4	1	1	2.13	3	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi	Kab Kutai Kartanegara	1	1,196,620,000			1	1,196,620,000
4	1	1	2.13	4	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana	Kab Kutai Kartanegara	2	400,000,000			2	400,000,000
4	1	1	2.13	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	Kab Kutai Kartanegara	2	400,000,000			2	400,000,000
4	1	1	2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Kab Kutai Kartanegara	12	20,081,496,536			12	11,939,561,750
4	1	1	2.14	1	Fasilitasi Keprotokolan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolan	Kab Kutai Kartanegara	4	6,686,728,350			4	4,208,197,350
4	1	1	2.14	2	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan	Kab Kutai Kartanegara	4	10,814,630,900			4	6,969,744,400
4	1	1	2.14	3	Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan	Kab Kutai Kartanegara	4	2,580,137,286			4	761,620,000
4	1	2			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	1) Persentase kebijakan Tata Pemerintahan yang ditindaklanjuti 2) Presentase Rumusan kebijakan bidang kesra yang diimplementasikan 3) Persentase Regulasi Daerah (PERDA dan PERBUP) 4) Presentase Kerjasama yang di tindak lanjuti			44,713,286,703				34,289,632,448
4	1	2	2.01		Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah Dokumen Administrasi Tata Pemerintahan	Kab Kutai Kartanegara	8	2,105,048,000			8	1,024,912,245
4	1	2	2.01	1	Penataan Administrasi Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan	Kab Kutai Kartanegara	2	593,600,000			2	418,600,000
4	1	2	2.01	2	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan	Kab Kutai Kartanegara	3	550,000,000			3	355,162,245
4	1	2	2.01	3	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Kab Kutai Kartanegara	3	961,448,000			3	251,150,000

4	1	2	2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah Orang/Lembaga Penerima Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Kab Kutai Kartanegara	219	39,824,724,703			219	30,831,198,203
4	1	2	2.02	6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kab Kutai Kartanegara	100	250,000,000			100	0
4	1	2	2.02	1	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual	Kab Kutai Kartanegara	10	27,560,000,000			10	19,804,473,500
4	1	2	2.02	2	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB	Kab Kutai Kartanegara	3	800,000,000			3	62,000,000
4	1	2	2.02	3	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja terkait Kesejahteraan Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas	Kab Kutai Kartanegara	6	10,964,724,703			6	10,964,724,703
4	1	2	2.02	4	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kab Kutai Kartanegara	100	250,000,000			100	0
1	2	2			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Kab Kutai Kartanegara	455	1,175,000,000			455	1,025,008,000
4	1	2	2.03	1	Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun	Kab Kutai Kartanegara	250	550,000,000			250	500,008,000

4	1	2	2.03	2	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitas Bantuan Hukum	Kab Kutai Kartanegara	5	450,000,000			5	350,000,000
4	1	2	2.03	3	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi	Kab Kutai Kartanegara	200	175,000,000			200	175,000,000
4	1	2	2.04		Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah Dokumen Fasilitas Kerjasama Daerah	Kab Kutai Kartanegara	21	1,608,514,000			21	1,408,514,000
4	1	2	2.04	1	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Dalam Negeri	Kab Kutai Kartanegara	13	542,000,000			13	550,000,000
4	1	2	2.04	2	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Kerja Sama Luar Negeri	Kab Kutai Kartanegara	2	548,514,000			2	608,514,000
4	1	2	2.04	3	Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama	Kab Kutai Kartanegara	6	518,000,000			6	250,000,000
4	1	3			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1) Persentase kebijakan di bidang ekonomi yang ditindaklanjuti 2) Persentase permasalahan kebijakan Administrasi pembangunan daerah yang diselesaikan 3) Persentase kebijakan Bidang SDA yang ditindaklanjuti 4) PERSENTASE PENGADAAN BARANG JASA YANG DI SELESAIKAN			8,413,350,385				3,646,850,385
4	1	3	2.01		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Kab Kutai Kartanegara	13	1,721,250,000			13	718,750,000
4	1	3	2.01	1	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Kab Kutai Kartanegara	5	590,000,000			5	340,000,000
4	1	3	2.01	2	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Kab Kutai Kartanegara	4	531,250,000			4	231,250,000
4	1	3	2.01	3	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Kab Kutai Kartanegara	4	600,000,000			4	147,500,000
4	1	3	2.02		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Kab Kutai Kartanegara	20	1,841,100,385			20	656,100,385

4	1	3	2.02	1	Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyusunan Program Pembangunan Daerah	Kab Kutai Kartanegara	6	950,000,000			6	215,000,000
4	1	3	2.02	2	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Kab Kutai Kartanegara	7	631,350,385			7	281,350,385
4	1	3	2.02	3	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Kab Kutai Kartanegara	7	259,750,000			7	159,750,000
4	1	3	2.03		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab Kutai Kartanegara	904	3,454,000,000			220	1,325,000,000
4	1	3	2.03	1	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Kab Kutai Kartanegara	684	1,754,000,000				500,000,000
4	1	3	2.03	2	Pengelolaan Layanan Pengadaan secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Kab Kutai Kartanegara	2	900,000,000			2	300,000,000
4	1	3	2.03	3	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa	Kab Kutai Kartanegara	218	800,000,000			218	525,000,000
4	1	3	2.04		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Kab Kutai Kartanegara	27	1,397,000,000			6	947,000,000
4	1	3	2.04	1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertanian, Pangan, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan, Perindustrian, KUKM, Penanaman Modal, Tenaga Kerja	Kab Kutai Kartanegara	15	599,000,000				499,000,000
4	1	3	2.04	2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertambangan dan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Pertambangan dan Sumber Daya Mineral, Lingkungan Hidup, Kominfo, Perhubungan, Statistik, Persandian	Kab Kutai Kartanegara	6	474,000,000			6	224,000,000

4	1	3	2.04	3	Koordinasi, Sinkronisasi dan Evaluasi Kebijakan Energi dan Air	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Evaluasi Kebijakan Urusan Energi dan Air, Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pertanahan	Kab Kutai Kartanegara	6	324,000,000				224,000,000
					TOTAL PAGU		184,669,572,638.00						145,036,154,083

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Akhir (RENJA) PD merupakan dokumen perencanaan OPD tahunan yang berlandaskan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2025, proses penyusunan RKPD Tahun 2025 mengacu pada prioritas pembangunan yang mendukung pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Pemerintah Daerah.

a. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian ;

1. Kebijakan belanja mandatory sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Visi-Misi dan Program Dedikasi Kukar Idaman.
3. Penyelesaian kegiatan-kegiatan yang belum tuntas.
4. Dukungan pada kebijakan nasional dan provinsi.
5. Penyediaan Data dan Informasi pembangunan yang valid dan aktual
6. Penyusunan RKPD tepat waktu dan tepat substansi

b. Kaidah – kaidah pelaksanaan ;

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, merupakan pedoman bagi PD dalam menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD), Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahunan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut :

1. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara dengan didukung oleh seluruh stakeholders termasuk dunia usaha, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, dengan sebaik-baiknya;

2. Bupati, dalam menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah berkewajiban untuk mengarahkan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, dengan mengerahkan semua potensi dan kekuatan daerah;
3. Sekretaris Daerah, berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026;
4. Perangkat Daerah (PD) Kabupaten Kutai Kartanegara berkewajiban untuk menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD) yang memuat, Tujuan, Sasaran, Strategi, Kebijakan, Program, Kegiatan Pokok dan Unggulan Pembangunan, sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026 yang selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA-PD) Kabupaten Kutai Kartanegara untuk menjamin konsistensi dan kontinuitas program dan kegiatan beserta pendanaannya;
5. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Kutai Kartanegara, berkewajiban untuk memandu proses perencanaan pembangunan, pemantauan, fasilitasi dan mediasi terhadap penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, kedalam Rencana Strategis Perangkat Daerah (RENSTRA-PD), serta membangun komunikasi organisasi dan komunikasi kepada masyarakat secara berkesinambungan tentang

RPJMD, Pelaksanaan RPJMD, Pengawasan pelaksanaan RPJMD, serta evaluasi pelaksanaan RPJMD;

6. Dalam pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, berpedoman kepada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Kutai Kartanegara, agar terwujud keselarasan dan kesinambungan pembangunan daerah;
 7. Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2021 – 2026, dilakukan pada tahun kedua dan pada akhir masa jabatan Bupati Kepala Daerah, terhadap indikator kinerja misi. Sedangkan evaluasi tahunan dilakukan terhadap indikator kinerja program dan kegiatan dengan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau melalui survei yang dilakukan oleh BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara, secara sendiri (evaluasi diri) untuk mengukur tingkat keberhasilan perwujudan visi dan misi dalam kerangka clean government and good governance (Dunia Usaha, Masyarakat dan Pemerintahan).
- c. Rencana tindak lanjut ;
- Tema Pembangunan RPJMD yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025 adalah **Pengembangan Ekonomi Unggulan Daerah Berbasis Desa dan Kecamatan** Sekretariat Daerah sebagai perangkat daerah yang menjalankan fungsi Koordinasi, Penyusunan Kebijakan dan fungsi pelayanan administratif diharapkan mampu untuk membantu program Peningkatan Jangkauan dan Kualitas Layanan Publik melalui Penataan Manajemen Organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah dengan cara :

1. Berperan dalam Penataan Manajemen Organisasi dan penguatan koordinasi perangkat daerah.
2. Peningkatan Kualitas Kebijakan yang disusun dan diberlakukan, serta,
3. Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat, baik sebagai Perangkat Daerah yang memberikan Layanan Masyarakat secara langsung termasuk juga sebagai Koordinator dalam memastikan Pelayanan Pelayanan Pemerintah Daerah secara umum telah sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

Pada akhirnya Rancangan Rencana Kerja Akhir (RENJA) PD ini berisi perencanaan strategis yang bersifat operasional dalam menterjemahkan tugas dan fungsi perangkat daerah. Ranwal Rencana Kerja (RENJA) PD nantinya menjadi acuan dan pedoman bagi unit kerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dalam menyusun rencana kerja tahunan yang ditandai dengan dituangkannya lokasi, sasaran dan indikator kinerja out put dan out come dari setiap kegiatan. Perencanaan strategis ini dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip efektif, efisien dan akuntabel, sehingga peningkatan kinerja individu, unit kerja dan organisasi dapat tercapai.

Rencana Kerja Akhir (RENJA) Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Tahun 2025 ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, adapun langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi, efektivitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Semoga Dokumen Rancangan Akhir Renja PD tahun 2025 ini dapat memberikan arahan yang jelas tentang apa yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat Daerah. Dukungan dalam hal penganggaran sangat diharapkan sehingga capaian target yang telah ditentukan dapat terwujud.



Sekretaris Daerah
Kabupaten Kutai Kartanegara,

Dr. H Sunggono, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19671004 198701 1001